

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Hendra F. Santoso

Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Krida Wacana

Abstract

Public Sector Accounting is defined as accounting mechanism of private sectors practice in public sector organizations. In other words, public sector accounting is equal with governmental accounting or public finance accounting. Nowadays the public sector accounting has been changed into society fund accounting. Society accounting fund is defined as follow: "Mechanism and analysis of accounting which are applied to society fund management."

Keywords : Public Sector Accounting

PENDAHULUAN

Mempelajari Akuntansi Sektor Publik berarti kita mempelajari Akuntansi dan Sektor Publik.

Pengertian Akuntansi

Ada beberapa pengertian akuntansi sebagai berikut :

Menurut Accounting Principle Board : "Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu entitas ekonomi yang dimaksud untuk digunakan sebagai dasar membuat pilihan diantara beberapa alternatif dalam pengambilan keputusan ekonomi"

Dari pengertian di atas kita melihat bahwa Akuntansi dilakukan oleh suatu entitas ekonomi dan informasi yang dihasilkan adalah informasi mengenai

entitas tersebut, dimana informasi yang dihasilkan tadi adalah berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi baik oleh eksekutif yang diberi tugas memimpin entitas tersebut maupun pihak ekstern yang ingin mengetahui keberadaan entitas tersebut.

Menurut American Institute of Certified Public Accounting: “Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran uang, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk melaporkan hasil-hasilnya dari suatu entitas dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi”

Dari pengertian di atas terlihat bahwa kegiatan akuntansi merupakan tugas yang kompleks dari beberapa aktivitas yaitu :

- a. Menggolongkan data mana yang berkaitan atau relevan
- b. Memproses dan menganalisa data yang relevan
- c. Mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan.

Pengertian Sektor Publik

Sektor Publik berkaitan dengan pelayanan bagi masyarakat. Sejarah munculnya sektor publik ini berawal dari timbulnya. Kebutuhan masyarakat secara bersama-sama terhadap barang atau layanan tertentu. Untuk menghindari terjadinya alokasi dan distribusi barang atau layanan umum yang tidak adil maka pengaturan pengalokasian dan pendistribusiannya diserahkan kepada pengurus tertentu, dimana warga masyarakat pada akhirnya menanggung biaya untuk mendukung pengaturan tersebut. Sektor publik ada karena dibutuhkan. Jadi keberadaan sektor publik ditengah masyarakat tidak bisa dihindari karena masyarakat membutuhkan barang atau layanan publik. Dalam perkembangannya sektor publik sangat berperan dalam pengaturan barang atau layanan publik untuk didistribusikan kepada masyarakat secara adil dan merata.

Dalam negara demokrasi kita mengenal trias politika yang membagi kekuasaan secara formal kedalam kelompok eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dari pengertian di atas dapat kita katakan bahwa dalam akuntansi sektor publik, data akuntansi digunakan untuk memberi informasi mengenai kondisi ekonomi

dan keuangan sektor publik kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif dan masyarakat.

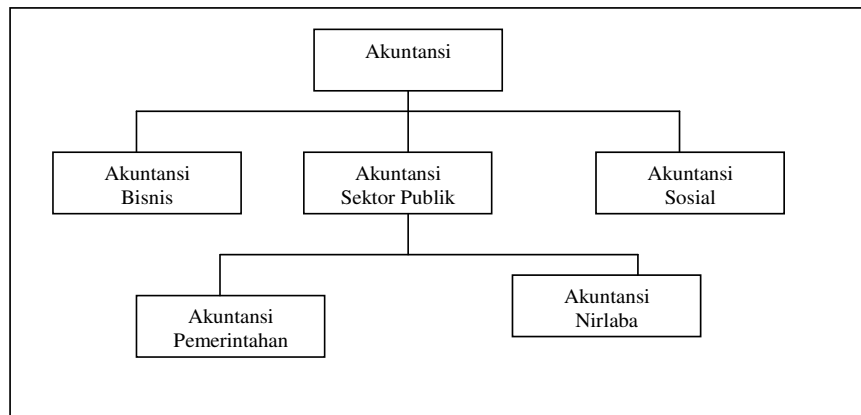
Perkembangan Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Dalam perkembangannya Akuntansi Sektor Publik didefinisikan sebagai Akuntansi Dana Masyarakat yaitu mekenisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat.

Dana masyarakat diartikan sebagai dana yang dimiliki oleh masyarakat, bukan individual. Dana ini biasanya dikelola oleh organisasi-organisasi sektor publik atau kerjasama sektor publik dengan swasta.

Di Indonesia, Akuntansi Sektor Publik dapat didefinsikan sebagai : Mekanisme teknik dan analisis akuntansi pada pengelolaan dana masyarakat di Pemerintah Pusat, Lembaga-Lembaga Tinggi Negara dan Departemen-Departemen, Badan Layanan Umum, Pemerintah Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Lembaga Sosial Masyarakat dan Yayasan Sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama organisasi sektor publik dan swasta.

Kedudukan Akuntansi Sektor Publik di Dalam Akuntansi



Gambar 1. Kedudukan Akuntansi

Akuntansi dapat dikelompokkan kedalam tiga bidang utama yaitu :

- a. Akuntansi bisnis
- b. Akuntansi Sektor Publik
- c. Akuntansi Sosial

Dalam akuntansi bisnis data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi keuangan kepada eksekutif perusahaan, pemilik modal, penanam modal, kreditor dan pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholder*)

Dalam akuntansi sektor publik, data akuntansi digunakan untuk memberi informasi mengenai kondisi ekonomi dan keuangan sektor publik kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif dan masyarakat.

Akuntansi sosial merupakan bidang akuntansi khusus untuk diterapkan pada entitas dalam artian makro, yang melayani perekonomian nasional seperti neraca pembayaran perkiraan arus dana, perkiraan pendapatan dan produksi nasional serta neraca nasional.

ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Penyediaan barang atau layanan publik dapat dilakukan oleh entitas swasta atau entitas pemerintah. Organisasi yang melakukan layanan publik tujuan pendiriannya lebih banyak untuk ikut mengatasi masalah-masalah sosial dalam masyarakat. Organisasi ini didirikan bukan untuk mencari laba saja (nirlaba). Salah satu pengelompokan organisasi nirlaba adalah berdasarkan sumber dana.

Untuk itu, setiap bentuk organisasi dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Organisasi bisnis, yaitu organisasi yang dibiayai oleh modal dan laba
- b. Organisasi nirlaba, yaitu organisasi yang dibiayai oleh masyarakat lewat donasi atau sumbangan
- c. Organisasi pemerintahan, yaitu organisasi yang dibiayai oleh masyarakat lewat pajak dan retribusi.

PERBEDAAN ORGANISASI BISNIS DAN ORGANISASI NIRLABA

a. Tenaga kerja bayaran dan tenaga kerja sukarela

Sebuah organisasi bisnis memulai usahanya dengan setoran modal dan pinjaman uang. Uang tersebut digunakan untuk membayar staff, membeli barang dagangan, lalu menjual produk tersebut kepada konsumen. Uang dari hasil penjualan masuk lagi ke dalam perusahaan dan dipakai kembali untuk membeli barang dagangan, membayar bunga pinjaman, mengembalikan pinjaman. Sebuah organisasi nirlaba dimulai dari pendiri yang menyumbangkan tenaga untuk digunakan dalam menyerahkan barang atau layanan kepada konsumen secara cuma-cuma, tidak ada uang yang bisa mengganti tenaga ditahapan awal ini, atau jikapun ada, biasanya uang “diberikan” oleh orang yang sama dengan yang memberikan tenaganya.

b. Pendanaan

Organisasi bisnis fokusnya menghasilkan laba, konsumen memiliki pilihan untuk membeli atau tidak sebuah produk, serta mereka bebas membeli produk perusahaan lain. Pilihan pertama tergantung pada kebutuhan konsumen terhadap produk atau layanan yang dibutuhkan; yang kedua tentang aspek kualitas, ketersediaan dan harga. Sumber dana utama perusahaan berasal dan uang konsumen. Perilaku belanja konsumen memberikan umpan balik kepada perusahaan tentang seberapa baik kerja, kekuatan standar kualitas produk atau layanan mereka. Jika sebuah produk tidak memenuhi standar yang dicari konsumen, perusahaan mengetahuinya dengan cepat dari penurunan penjualan. Jika perusahaan tidak melakukan penyesuaian produk sesuai dengan dengan kebutuhan konsumen maka mereka akan terdepak dari bisnis ini. Organisasi nirlaba fokusnya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. Konsumen seingkali tidak hadir secara langsung dan nyata. Saat mendekati konsumen, organisasi nirlaba lebih sering memberikan layanan gratis, jarang sekali terlihat kelompok lain memberikan layanan

yang sama kepada kelompok konsumen yang sama sehingga tidak ada persaingan bagi konsumen.

Dalam organisasi nirlaba, bukan konsumen menjadi ukuran “kebutuhan” kualitas layanan dan “efisiensi”. Organisasi nirlaba tidak memperoleh umpan balik langsung dari konsumen seperti hasil yang didapatkan oleh perusahaan berbasis laba.

Sumber dana organisasi nirlaba adalah donasi atau sumbangan.

c. Nilai-nilai

Organisasi bisnis digerakan oleh laba, organisasi nirlaba dijalankan oleh nilai-nilai. Anggota organisasi digerakan oleh komitmen mereka terhadap nilai-nilai tersebut. Kekuatan berbagi nilai untuk memotivasi dan mengkoordinasikan orang-orang itu begitu hebatnya sehingga banyak organisasi bisnis mencoba menandinginya.

d. Kepemimpinan Sukarela

Organisasi nirlaba dipimpin secara sukarela. Dalam waktu beberapa tahun staf menjadi lebih profesional, pengurus diisi oleh orang-orang dari berbagai tingkat sosial. Perbedaan ini dapat menimbulkan konflik di dalam tubuh kepengurusan organisasi. Konflik di organisasi nirlaba bisa menyehatkan dan memberi pelajaran kepada pengurus tetapi konflik dapat juga mengambil alih semua agenda para pengurus sehingga membutuhkan bantuan dari luar untuk menyelesaikannya,

BADAN LAYANAN UMUM

Dalam organisasi pemerintahan kita mengenal Badan Layanan Umum di Pemerintah Pusat dan Badan Layanan Umum Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada hakekatnya bersifat mengatur dan memberi pelayanan kepada masyarakat. Pada tataran nasional pembentukan pemerintahan negara diselenggarakan dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana digariskan dalam pembukaan UUD 1945 yakni antara lain untuk

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk dapat mencapai tujuan nasional telah dilakukan dengan berbagai kebijakan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya antara lain menyusun berbagai program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBN dan APBD. Khususnya pada tataran penyelenggaraan pemerintah di daerah yang dibiayai dari APBD, di dalamnya terdapat salah satu pola pelayanan kepada masyarakat melalui suatu badan yang disebut Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). BLUD adalah unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan layanan yang dijual tanpa mengutamakan mencari laba dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Ketentuan tentang pengelolaan keuangan BLUD diatur dalam Pasal 68 dan 69 UU No. 1 Tahun 2004, PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 145 sampai dengan Pasal 150 PP No. 58 tahun 2005, dan Pasal 324 sampai dengan Pasal 329 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006.

Karena sifatnya yang khusus yakni tidak mengutamakan laba, walaupun pengelolaan BLUD mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya, namun perencanaan penganggaran, pertanggungjawaban dan pelaporan merupakan bagian dari APBD, artinya kekayaan yang dikelola BLUD bukan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dari APBD.

Tujuan dibentuknya BLUD adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas serta penerapan praktek bisnis yang sehat.

Dilihat dari kegiatannya, BLUD dapat dibentuk oleh pemerintah daerah untuk:

- a. Menyediakan barang dan layanan umum.
- b. Mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan layanan kepada masyarakat.

Bentuk BLUD pada unit kerja yang mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan layanan kepada masyarakat, antara lain unit kerja yang melaksanakan pengelolaan dana seperti dana bergulir usaha kecil, menengah, tabungan perumahan, dan unit kerja pengelola dana lainnya.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

- a. Untuk memahami Akuntansi Sektor Publik kita perlu mengerti apa itu Akuntansi dan apa itu Sektor Publik, yaitu kegiatan mengubah data menjadi informasi mengenai kondisi ekonomi dan keuangan dari organisasi yang bertujuan memberi pelayanan kepada masyarakat.
- b. Informasi yang dihasilkan dari Akuntansi Sektor Publik ini digunakan oleh pihak eksekutif, legislatif, yudikatif untuk mengambil keputusan.
- c. Akuntansi Sektor Publik dalam pemahaman kita disini adalah bagian dari Akuntansi yang mempelajari akuntansi pada organisasi pemerintah (Akuntansi Pemerintahan) dan akuntansi pada organisasi nirlaba.
- d. Dalam perkembangannya Akuntansi Sektor Publik didefinisikan sebagai Akuntansi Dana Masyarakat.
- d. Organisasi bisnis berbeda dari organisasi nirlaba dimana organisasi bisnis memulai usahanya dengan tenaga kerja bayaran, setoran modal, fokusnya menghasilkan laba. Sedangkan organisasi nirlaba memulai usahanya dengan menyumbangkan tenaga, menggerakkan anggotanya dengan nilai-nilai dan memberi layanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.
- e. Dalam organisasi Pemerintahan Daerah kita mengenal Badan Layanan Umum yang memberi pelayanan kepada masyarakat yang tidak mengutamakan laba. Di Pemerintah Daerah kita mengenal Badan Layanan Umum Daerah (BULD)

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hafiz Tanjung, *Akuntansi Pemerintahan Daerah*, Bandung, Alfabeta, 2007

Abdul Hakim, *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta, Salemba Empat, 2004

Bastian Indra, *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, Yogyakarta, BPFEUGM, 2001

Basuki, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2007

Deddi, Iswahyudi, Maulidah, *Akuntansi Pemerintah*, Jakarta, Salemba Empat, 2007

Joyce, Ken dan John, *Menggalang Dana Untuk Organisasi Nirlaba*, Ina Publishatama, 2007

www.id.wikipedia.org

